

**Judul Penelitian: PERAN PENGUSAHA PENGURUSAN
JASA KEPABEANAN (PPJK) DALAM
PROSEDUR KEGIATAN IMPOR DAN
PENERAPAN PAJAK DALAM
RANGKA IMPOR PADA PT. VALVE
MANDIRI INDONESIA SURABAYA**

Dosen Pembimbing : Dr. Sri Luayyi, S.E., M.S.A., CAAT
Eni Srihastuti, S.E., M.M.
Nama Mahasiswa : Anindya Kiara Aisyiya Situsmara
NPM : 20130310084

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dalam prosedur kegiatan impor *valve* pada PT.Valve Mandiri Indonesia Surabaya, serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pajak Dalam Rangka Impor barang serta bagaimana keuntungan atau kerugian apabila menggunakan atau tidak menggunakan Jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yaitu PT.Sawarawaba Transjaya. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan dalam kegiatan impor bagi importir memiliki hubungan yang saling melengkapi. Bagi PT.Valve Mandiri Indonesia, sebuah importir menengah yang belum memiliki divisi Ekspor-Impor sendiri, menggunakan layanan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), seperti PT.Sawarawaba Transjaya, adalah pilihan yang tepat. Dalam pengelolaan kepabeanan, importir menyerahkan dokumen-dokumen impor yang lengkap, seperti *Sales Contract*, *Invoice*, *Packing List*, *Bill of Lading*, dan *Certificate of Origin*, kepada PPJK setelah memberikan surat kuasa kepada mereka. Setelah

menerima dokumen-dokumen ini, PPJK kemudian membuat Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Proses selanjutnya melibatkan pembayaran e-billing untuk Pajak Pertambahan Nilai Impor (PPN), Pajak Penghasilan 22 Impor (PPh 22), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) jika barang yang diimpor dikategorikan dalam jenis barang mewah. Setelah pembayaran *billing*, barang yang diimpor oleh pihak bea cukai akan diproses melalui dua jalur, yaitu jalur merah dan jalur hijau. Dalam kasus impor PT.Valve Mandiri Indonesia, barang impornya diberi jalur hijau sehingga dapat langsung dikirim ke gudang. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh bea cukai ditemukan adanya kurang bayar pada nilai pabean maka bea cukai menetapkan SPTNP. Dan importir berhak mengajukan keberatan apabila merasa tidak sesuai dan membayar jaminan.

Kata kunci: Prosedur Kegiatan Impor, Pajak Dalam Rangka Impor

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Batasan Masalah.....	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori	15
2.2.1 Kegiatan Impor.....	15
2.2.2 PPJK	19

2.2.2.1	Kewajiban (PPJK).....	20
2.2.2.2	Prosedur Kepengurusan PPJK.....	21
2.2.3	Pengertian Kepabeanan dan Daerah Pabean	22
2.2.4	Bea Masuk.....	24
2.2.4.1	Tarif Bea Masuk	25
2.2.5	Pajak Dalam Rangka Impor.....	26
2.2.5.1	(PPh 22 Impor)	28
2.2.5.2	(PPN)	29
2.2.5.3	(PPnBM)	29
2.2.6	Dokumen Pelengkap Impor	31
2.3	Teori Hubungan Antar Variabel.....	34
2.4	Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		38
3.1	Ruang Lingkup Penelitian	38
3.2	Jenis Penelitian	38
3.3	Lokasi Penelitian	39
3.4	Data dan Teknik Pengumpulannya.....	39
3.1.1	Sumber Data	39
3.1.2	Jenis Data	40
3.1.3	Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5	Identifikasi Variabel.....	42
3.6	Definisi Operasional Variabel	42
3.7	Teknik Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Hasil Penelitian	46
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan Importir ..	46
4.1.2 Struktur Organisasi	46
4.1.3 Sejarah Pengusaha Pengurusan.....	49
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	50
4.2.1 Prosedur Kegiatan Impor Barang.....	50
4.2.2 Penerapan Pajak Dalam Rangka Impor	83
4.2.3 Interpretasi Hasil Penelitian.....	83
4.2.3.4 Celah Kecurangan.....	88
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	99